

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

- Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2008, *Kebatalan di Bidang Kenotariatan,. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Peraturan Bersifat Mengatur dan Bersifat Memaksa,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- BHP Surabaya, 2013, *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*, BHP Surabaya, Surabaya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arif , 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ALUMNI, Bandung.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo,Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, UAJY, Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo,R.Soetojo, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Efata, Jakarta.

Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Satrio, J., 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Syahrani, H. Riduan, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, P.T Alumni, Bandung.

Suherman, Ade Maman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, NLRP, Jakarta.

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2016, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta.

2) Makalah/ Jurnal

Dwiyanto, Agus, “Revitalisasi Pemerintahan Melalui E-Government”, *Lokakarya Nasional Strategi dan Tahapan Implementasi E-Government Untuk Pemda*, 9-11 Oktober 2003, Gama Technocamp UGM, Yogyakarta.

Hapsari, Dwi Ratna Indri, “Kontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, ISSN : 2355-2646, Edisi 1 Januari – Juni 2014, Surakarta.

Junaidi, “E-Government Dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 9, Nomor 1, Mei 2005, Jakarta.

3) Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Staatsblad* 1915 Nomor 732.

Stbl Nomor 166 Tahun 1872, Ordonnantie Van 5 Oktober 1872 Tentang Balai Harta Peninggalan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951

Undang- undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap berlakunya segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Balai Harta Peninggalan.

Rancangan Undang-undang Balai Harta Peninggalan.

4) Tesis

Ramadhany, Siti Hafsa, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan sebagai Wali Pengawas), *Tesis*, Program Pasacasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.

Devi, Shitavadhani, Optimalisasi Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Terhadap Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian di Kabupaten Jombang, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.

Yuliansyah, Rama, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dalam Hal Perwalian, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.